

Nasionalisme Humanistis Mahatma Gandhi

Agnes Sri Poerbasari

ABSTRACT *This article proposes to investigate how Gandhi developed the idea of humanistic nationalism and what the component of this idea is. Using the historical and political approaches, the investigation shows that Gandhian's nationalism reveals the relationship between religious aspiration, political ethic and the ideal economic and political institutions.*

Chronologically, this study describes Gandhi's leaderships in South Africa (1893-1914) and India (1915-1948), the basic orientation of Gandhi's thought and lastly explains the concept of humanistic nationalism. Briefly, the components of humanistic nationalism are the ideas of Hind Swaraj, Nation, Sarvodaya, Khadi Economic, Ramrajya and Panchayat Raj. Behind all those concepts is Ahimsa, the principle of no harm which emphasizes and teaches about love and non-violence. Both attributes are used as weapons by Gandhi's Satyagraha movement. Ahimsa is also the core of Gandhian political ethic and lies on his ideal economic and political institutions. By this moral effect of Ahimsa, we could easily identify Gandhi's nationalism with the unique character called humanistic.

KEYWORDS *Ahimsa, Satyagraha, Hind Swaraj, Sarvodaya*

Bagi banyak kalangan, berakhirnya era Perang Dingin pada tahun 1990-an diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif bagi perdamaian dunia karena selama ini Perang Dingin sering dituding sebagai penyebab berbagai konflik politik antarbangsa. Namun konflik politik yang seringkali berkembang menjadi peperangan ini, nyatanya belum juga berakhir dari muka bumi kendati perang itu sendiri telah berakhir selama satu dekade. Invasi AS ke Irak, konflik di Timur Tengah, perang saudara di Sudan merupakan beberapa contoh di mana kekerasan seakan-akan merupakan solusi yang lazim bilamana konflik politik tidak dapat lagi dihentikan melalui langkah-langkah negosiasi dan kompromi.

Sehubungan dengan adanya cara-cara kekerasan untuk mengatasi konflik politik internasional maupun nasional tersebut, maka mau tak mau memunculkan masalah etis mengingat para aktor politik selalu menyuarakan nilai-nilai etis seperti kebaikan bersama, keadilan, demokrasi, dan sebagainya.

Namun demikian, mereka seakan tak peduli dengan cara yang digunakan untuk mencapai nilai-nilai itu, yakni melalui kekerasan. Cara ini tentunya akan mengorbankan jiwa-jiwa yang tak bersalah, sehingga melahirkan satu permasalahan baru yaitu dengan penggunaan cara kekerasan untuk mengejar tujuan yang baik akan mengakibatkan adanya pelanggaran martabat manusia.

Sebagai upaya untuk memahami persoalan etis yang muncul yakni apakah kekerasan merupakan tindakan yang dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang baik, maka tulisan ini bertujuan untuk meninjaunya dari cara pandang Mahatma Gandhi mengenai *non-violence* (tanpa kekerasan) sebagai prinsip etika politik. Gagasan ini sendiri akan menjadi lebih jelas dalam nasionalisme humanistisnya.

Gagasan nasionalisme humanistik Gandhi merupakan gagasan yang unik mengingat nasionalisme yang berkorban di Asia-Afrika pada awal abad ke-20 selalu diiringi dengan gerakan revolusioner, namun Gandhi justru meyakini bahwa *Ahimsa* dan atributnya, *satyagraha* (tekad kebenaran, jalan tanpa kekerasan) sebagai prinsip sekaligus sarana yang paling tepat untuk mencapai kemerdekaan India. Dengan prinsip yang diyakininya inilah maka nasionalisme Gandhi berbeda dengan nasionalisme tokoh-tokoh lain pada zamannya.

MENGENAL GANDHI: PENGACARA DARI RAJKOT

Mohandas Karamchand Gandhi dilahirkan pada tanggal 2 Oktober 1869 di Porbandar, Gujarat. Ayahnya, Kaba Gandhi adalah seorang *diwan* di Pengadilan Rajasthanik, sedangkan ibunya, Putlibai seorang ibu rumah tangga biasa. Keluarga Gandhi tergolong kasta Bania dan menganut agama Hindu dari sekte Vaishnav.

Gandhi menempuh pendidikan dasar dan menengah di kota Rajkot, karena ia harus mengikuti ayahnya yang pindah ke kota ini. Pada saat ia menempuh pendidikan menengah atau berusia kurang lebih tiga belas tahun ia telah dinikahkan dengan Kasturbai. Perkawinan Gandhi adalah hal yang biasa karena pada masa ini perkawinan di bawah umur merupakan tradisi. Keluarga baru ini nantinya dikaruniai tiga putra (Gandhi 1985: 23 – 24).

Pada tahun 1887, Gandhi lulus ujian masuk universitas di Ahmedabad dan kemudian ia memutuskan untuk kuliah di Samaldas College. Namun akhirnya ia keluar karena mendapat kesulitan dalam mengikuti kuliah di universitas tersebut. Selanjutnya, Mavji Dave, seorang Brahmana dan sahabat keluarga menganjurkan Gandhi untuk kuliah hukum di Inggris, mengingat pengacara lulusan Inggris akan mudah mendapat pekerjaan di India. Anjuran ini tentu saja tidak serta merta disetujui keluarga Gandhi karena selain masalah biaya juga karena Gandhi adalah satu-satunya anggota kasta Bania yang akan ke luar negeri. Tak mengherankan bila sebagian anggota kasta mengucilkannya. Ibunya sendiri akhirnya merestui setelah mendengar janji Gandhi untuk tetap menjadi vegetarian dan setia pada istri (Gandhi 1985: 49 – 52).

Gandhi tiba di Inggris pada tahun 1888. Di negeri ini ia mulai belajar menyesuaikan diri dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, antara lain membaca koran, belajar dansa, bermain biola dan belajar bahasa Perancis. Ia juga menjadi anggota teosofi yang menyebabkannya belajar tentang kitab suci dari banyak agama seperti Injil sekaligus mendalami Bhagavadgita, namun yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Sir Edwin Arnold.

Untuk menempuh pendidikan pengacara, Gandhi memilih *London Matriculation*. Selama studi ia mempelajari hukum Inggris, hukum Romawi dan bahasa Latin, sedang hukum India dan Hindu tidak diajarkan di sini. Ia baru mempelajarinya ketika tiba di India (Gandhi 1985: 60, 76, 87). Gandhi lulus ujian pengacara pada tanggal 10 Juni 1891. Keesokan harinya ia mencatatkan diri ke Pengadilan Tinggi dan pada tanggal 12 Juni 1891 ia pulang ke India.

Setiba di Rajkot, Gandhi menyadari bahwa ternyata tidak mudah menjalankan pekerjaan pengacara ditambah lagi ia tidak menguasai hukum India, Hindu dan Islam. Untuk mendapatkan perkara ia harus pindah ke Bombay dan di kota ini ia gagal menangani sebuah perkara kecil hingga akhirnya kembali lagi ke Rajkot. Perjalanan hidupnya sebagai pengacara di kota ini justru hancur karena Rajkot penuh dengan permainan politik dan ketidakadilan terhadap suku minoritas yang merupakan klien Gandhi. Gandhi bahkan pernah diusir dari rumah seorang *Sahib* (pejabat) yang tak berkenan dengan upayanya untuk membela kakaknya. Dalam situasi seperti ini, Gandhi memutuskan untuk menerima tawaran menangani perkara Dada Abdullah & Co di Afrika Selatan. Dengan kesepakatan untuk bekerja selama satu tahun dan dengan bayaran sejumlah £150, maka pada tahun 1893 Gandhi berlayar menuju Durban, Natal di Afrika Selatan (Gandhi 1985: 101 – 103).

PEMBEBAS BANGSA DI AFRIKA SELATAN

Situasi di Afrika Selatan merupakan situasi yang melahirkan Gandhi sebagai pembela kaum yang terpinggirkan, tokoh nasionalis yang humanis sekaligus pemimpin moral bagi bangsanya. Untuk memahami situasi yang memicu ketokohan Gandhi maka di sini dipaparkan tentang situasi Afrika Selatan.

Natal, Transvaal dan Orange Free State merupakan koloni-koloni Imperium Inggris di Afrika Selatan. Pada tahun 1860, Pemerintah Natal dan India menandatangani persetujuan pengiriman buruh-buruh kontrak India untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan tebu di Natal. Sesuai kontrak, buruh bekerja selama tiga tahun dan kemudian dapat diperpanjang selama lima tahun. Setelah itu mereka bebas.

Migrasi buruh-buruh kontrak ini terus berlangsung dan kemudian diikuti oleh kedatangan para pedagang Muslim yang berasal dari pantai barat India. Sebagai catatan, pada tahun 1895 di Natal terdapat orang India sejumlah 46.000 jiwa. Jumlah ini pada tahun 1904 mencapai 100,418 sedang orang Eropa tercatat 97,109 (Singh 1994: 95).

Meningkatnya jumlah orang India merupakan ancaman ekonomi bagi warga kulit putih. Untuk menekan orang-orang India ini maka orang kulit

putih mulai mendesak Dewan Legislatif Natal agar memberlakukan berbagai undang-undang yang bercorak diskriminatif. Hal serupa juga terjadi di Orange Free State dan Transvaal (Singh 1994:95). Ketiga koloni ini pada akhirnya mengundangkan berbagai undang-undang dan puncaknya adalah undang-undang yang menghapus hak-hak politik orang India. Dengan demikian, orang India tidak lagi memiliki hak sebagai warga negara di bawah Imperium Inggris dan situasi ini tentu saja mempermudah orang kulit putih untuk membuat undang-undang yang diskriminatif.

Situasi sosial yang penuh diskriminasi rasial inilah yang tidak pernah dibayangkan Gandhi. Oleh sebab itu, ketika ia tiba di Durban ia merasa terhina karena diharuskan membuka sorban di pengadilan, ia juga ditolak ketika masuk ke dalam gerbong kereta api kelas satu di Charlestown, dilarang duduk bersama orang kulit putih di kereta dan yang menyakitkan ia sering kali dipanggil *samy* atau *coolie* (Gandhi 1994:124–125),

Setelah perkara Dada Abdullah selesai pada awal tahun 1894, ia bermaksud segera pulang namun tertunda karena pada tahun yang sama Dewan Legislatif Natal mengajukan Rancangan Undang-Undang pencabutan hak-hak orang India untuk memilih anggota dewan. Gandhi segera membentuk komite kerja untuk menentang rencana tersebut. Ia juga mendirikan partai *Natal Indian Congress* dan menggalang kekuatan politik yang mampu mempersatukan orang India dari berbagai agama seperti Hindu, Islam, Parsi dan Kristen, berasal dari wilayah Gujarat, Madras, Tamil, serta tidak memandang pekerjaan baik itu buruh atau pedagang. Melalui gerakan ini, Gandhi telah memberikan penyadaran politik bahwa mereka adalah satu dan menunjukkan pentingnya hak-hak politik sehingga harus diperjuangkan.

Perjuangan Gandhi berlanjut ketika ia pulang ke India pada akhir tahun 1894. Ia menyebarkan "*Green Pamphlet*" untuk menginformasikan situasi di Afrika Selatan, sekaligus membangun solidaritas untuk nasib sesama anak bangsa. Seruan Gandhi segera disambut oleh rakyat dan tokoh-tokoh politik seperti Tilak dan Gokhale (Krishnaswamy 1994: 197). Pada tahun 1897, Gandhi kembali ke Afrika Selatan dengan disertai istri, anak dan saudaranya.

Kehidupan Gandhi di Afrika Selatan pada tahun 1897–1914 sungguh menarik untuk dipelajari. Dalam kehidupan spiritual, Gandhi dapat dikatakan berusaha menuju kesempurnaan. Seperti terlihat pada tahun 1906 di mana ia bersumpah menjadi *Brahmacharya* (hidup selibat) setelah berunding dengan istri. Pengabdian pada masyarakat telah menguatkan niatnya untuk melepaskan diri dari kedekatan hidup berkeluarga dan menerima kemiskinan sebagai teman sepanjang hidup (hidup sebagai *Vanaprastha*). Usaha selanjutnya adalah menjalani *Brata* untuk menuju kebebasan sejati. Sumpah *Brahmacharya* ini yang nantinya merupakan persiapan *Satyagraha* (Gandhi 1985:192–193).

Menyangkut kehidupan politik khususnya tentang pandangan terhadap Imperium Inggris, setidaknya dalam Perang Boer dan Zulu, Gandhi menunjukkan kewajibannya sebagai warga negara dengan berpartisipasi sebagai anggota Korps Ambulans. Namun di sisi lain kesadaran nasionalnya

juga meningkat seperti terwujud dalam gerakan politik dan kesadaran akan identitas bangsanya.

Situasi di Afrika Selatan telah menumbuhkan kesadaran Gandhi untuk mengangkat martabat bangsanya yang mayoritas bekerja sebagai kuli kontrak dan buta huruf. Ia mendidik mereka untuk tidak lagi melihat distingsi antara yang berkasta dan tidak berkasta. Pengalaman di Afrika Selatan telah mendekatkan Gandhi pada kelompok yang terpinggirkan seperti buruh kontrak, pariah atau yang sering disebut *the Untouchable*. Kelompok ini yang nantinya sangat menderita ketika berbagai undang-undang diskriminatif diberlakukan seperti pajak £3 per kepala, *The Asiatic Registration Bill* di Transvaal dan sebagainya.

Sebagai upaya menentang ketidakadilan dalam undang-undang tersebut, Gandhi membangun gerakan yang dikenal dengan *satyagraha*, suatu bentuk perlawanan tanpa kekerasan yang dapat berupa pembangkangan sipil (*civil disobedience*), boikot dan *passive resistance*. Gerakan *satyagraha* secara besar-besar terjadi pada tahun 1906 dan 1908. Pada tahun 1908, ribuan orang India melintasi Transvaal tanpa sertifikat dan sebagian berdagang tanpa ijin. Mereka dengan sengaja melanggar hukum sebagai pernyataan damai tentang hak-hak mereka yang telah dihapus. Sebagai akibat gerakan itu Gandhi ditahan.

Di samping gerakan *satyagraha*, Gandhi juga meminta *Congress* di India untuk mengadopsi resolusi tentang Afrika Selatan. Lebih dari sekedar sebuah resolusi, Gokhale sebagai tokoh *Congress* terkemuka pada tahun 1914 mengirim C.F. Andrew untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Afrika Selatan. Hasilnya sangat luar biasa, karena dalam perundingan antara Gandhi dan Smuts yang difasilitasi C. F. Andrew menghasilkan *The Indians' Relief Act*. Di dalam undang-undang ini tertuang pasal-pasal yang mencabut pajak £3, pengakuan terhadap perkawinan orang India serta penghapusan buruh kontrak pada tahun 1920 (Ali 1994: 15 – 16).

Dengan pemberlakuan *The Indians' Relief Act*, Gandhi merasa bahwa pekerjaannya tidak lagi di Afrika Selatan tapi di India. Tugas kemudian ia alihkan pada Mansukhlal Nazaar dan Khan. Pada bulan Juli 1914, sebelum kembali ke India, Gandhi mendapat gelar kehormatan *Deshabhaktha Mahatma* (yang berarti jiwa agung atau orang suci). Di India pun, *Indian National Congress* memberi penghormatan kepahlawanan bagi Gandhi dan pengikutnya karena telah berkorban dan menderita demi kehormatan India. (Krishnaswamy 1994: 207).

SEBAGAI PEJUANG KEMERDEKAAN DAN GURU BANGSA INDIA

Atas saran Gokhale, Gandhi harus ke Inggris sebelum kembali ke India. Ketika tiba di London, Perang Dunia I telah meletus dan ia segera menghimbau orang India di Inggris untuk menjadi relawan perang. Pernyataan ini tentu saja menuai kritikan walau akhirnya diterima, Gandhi sendiri pada akhirnya tidak berpartisipasi karena sakit.

Gandhi tiba di India pada tahun 1915 dan atas saran Gokhale (mentor politik Gandhi), ia berkeliling tanah India untuk mendapatkan pengalaman

sebelum terjun dalam politik. Setidaknya Gandhi memerlukan waktu lima tahun untuk memulai *satyagraha* bagi kemerdekaan India.

Selama lima tahun itu, Gandhi menjelajah dan menemukan kesulitan masyarakat di segala aspek seperti mulai dari masalah transportasi, kebiasaan kotor, kebodohan, kemiskinan, pajak tinggi, kesehatan dan sebagainya. Perjalanan ini juga diwarnai dengan peziarahan ke kuil-kuil suci dan berdialog dengan para mahatma.

Dari catatan sejarah, perjalanan selama lima tahun tersebut sesungguhnya merupakan langkah politik informal karena sebagian kegiatan-kegiatan Gandhi dapat dikategorikan ke dalam kegiatan politik. Di Bombay, Karachi, Lahore, dan Calcutta, Gandhi melakukan agitasi untuk mendidik rakyat tentang perlunya penghapusan buruh kontrak. Di Champaran, Bihar, ia melakukan reformasi sosial untuk menghapus sistem *Tinkathia* (kewajiban petani penggarap untuk menanam nila pada tiga petak dari 20 petak tanah miliknya). Setelah itu, di Kheda ia melakukan reformasi di bidang hukum melalui upayanya menghapus sistem pajak yang mencekik rakyat dan di Ahmedabad ia pernah menjadi mediator konflik perburuhan.

Dalam tiap proses mediasi baik di Bihar, Kheda maupun Ahmedabad, Gandhi mulai mengajarkan dasar *satyagraha* yaitu ajaran tanpa kekerasan sebagai sarana atau metode untuk mencapai tujuan. Dalam tiap rapat umum, Gandhi juga selalu menekankan pemeliharaan ketenteraman dan rasa hormat terhadap sesama maupun diri sendiri (Gandhi 1985: 362, 364, 379, 382 – 383, 390).

Hal lain yang didapat Gandhi dari perjalanannya adalah pandangan nasionalisme yang semakin mewujud seperti terlihat dengan usahanya untuk mengangkat bahasa Hindi dan Urdu sebagai bahasa lingua franca India. Ia juga menggagas keterkaitan antara kemerdekaan dan pengentasan kemiskinan yang nantinya tampil dalam konsep-konsep *swaraj* dan ekonomi *khadi*. Nasionalisme Gandhi juga menyangkut kesatuan bangsa India. Dia menentang gagasan Moh. Ali Jinnah bahwa India terdiri dari dua bangsa yaitu bangsa Hindu dan Muslim. Bagi Gandhi, keduanya adalah satu bangsa karena diikat oleh peradaban yang sama. Dengan konsep ini Gandhi tidak pernah menyetujui partisi India - Pakistan.

Pada tahun 1919 kepemimpinan Gandhi mulai menonjol yakni dengan kemampuannya menggerakkan rakyat India untuk melakukan *Hartal* (pembersihan diri dan puasa) sebagai langkah awal menentang Rencana Undang-Undang Rowlatt, sebuah RUU kewarganegaraan. *Hartal* merupakan persiapan *satyagraha* di mana rakyat diajak untuk melakukan perlawanan tanpa kekerasan dalam wujud pembangkangan sipil (Gandhi 1985: 409). Gerakan *satyagraha* ini gagal karena kerusakan meletus di Ahmedabad. Gandhi segera menanggungkannya hingga rakyat menangkap makna damai, suatu makna yang hanya bisa dipahami bila rakyat sudah dapat bertindak menurut *Ahimsa*

Pada tahun 1920, Gandhi terpilih sebagai pucuk pimpinan Congress. Ketokohnya tidak tertandingi oleh tokoh-tokoh lain seperti Bal Gangadhar

Tilak, Bipin Chandra Pal dan Moh. Ali Jinnah (pendiri Liga Muslim). Sementara itu tokoh-tokoh seperti Pandit Nehru, Sardar Patel, Maulana Azad, Jayendra Prasad, dan C. Rajagopalachari adalah para tokoh pejuang yang menganut garis pemikiran Gandhi (Guha 1986: 2-4).

Di bawah Gandhi, *Congress* yang semula dikenal sebagai organisasi politik, atau tepatnya partai politik elitis dan berorientasi pada reformasi konstitusi kini berorientasi pada rakyat. Gandhi segera mereformasi konstitusi dan menjadikannya sebagai sarana efektif untuk memobilisasi rakyat. *Satyagraha* yang merupakan prinsip perjuangan Gandhi kini ditetapkan sebagai prinsip gerakan *Congress* untuk mencapai kemerdekaan India.

Pada tahun 1921, gerakan *satyagraha* dicetuskan untuk menentang reformasi konstitusi di bawah *The Montagu-Chelmsford*. Dalam gerakan ini, secara hati-hati Gandhi menolak keterlibatan tentara dan polisi untuk menghindari terjadinya kekerasan. Ia dikenal sebagai penentang pengambilalihan kekuasaan dengan cara kekerasan, yang menjadi preferensinya adalah transfer (peralihan kekuasaan) melalui perlawanan yang berbentuk tindakan non-kooperasi.

Gerakan ini gagal karena Inggris tetap bertahan pada perjanjian *The Montagu-Chelmsford*, sebagai akibatnya muncul keraguan di dalam *Congress* terhadap efektivitas *satyagraha*. Adapun pihak-pihak yang sebelumnya menentang metode perjuangan Gandhi lantas mendirikan partai-partai baru seperti Partai Sosialis dan Partai *Swaraj*. Gandhi sendiri ditahan pada tahun 1922 hingga tahun 1924, setelah keluar ia lebih berkonsentrasi pada reformasi sosial khususnya pengembangan ekonomi *khadi* (Power 1961: 22).

Pada tahun 1929, Gandhi kembali terjun ke politik dengan menyerukan kemerdekaan dari Inggris. Pada tahun berikutnya, 1930, ia kembali mengobarkan gerakan *satyagraha* untuk menentang undang-undang garam yang dimonopoli pemerintah. Gandhi berhasil mengajak rakyat untuk pergi ke laut dan membuat garam sendiri. Apa yang dilakukan rakyat merupakan bentuk pembangkangan sipil yang mampu menekan Inggris untuk berunding dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di London.

Perundingan KMB tersebut menghasilkan *Irwin-Gandhi Agreement* yang antara lain menyetujui pencabutan undang-undang garam, tapi tetap belum menyetujui kemerdekaan India. Bahkan dalam perundingan ini, Inggris berhasil memasukkan skema partisi India-Pakistan seperti yang dituntut Liga Muslim selain skema tentang kemerdekaan India. Berakhirnya perundingan membuktikan kegagalan *satyagraha* sebagai metode perjuangan (Power 1961: 22-24 dan Guha 1986: 54).

Kegagalan gerakan *satyagraha* untuk kedua kalinya ini semakin mempertajam kritikan terhadap ajaran Gandhi dan meningkatkan militansi dalam *Congress*. Akhirnya pada tahun 1934 Gandhi menarik gerakan *satyagraha* dan secara resmi mengundurkan diri sebagai anggota formal *Congress*. Namun demikian *Congress* tetap menghormatinya sebagai pemimpin gerakan perjuangan nasional dan pengaruh Gandhi tetap kuat dalam memberi "restu" terhadap pimpinan *Congress* berikutnya. Ia pun tetap diakui sebagai pemimpin moral dan guru bangsa.

Setelah itu, Gandhi berkonsentrasi pada masalah sosial khususnya kemiskinan. Ia juga menerbitkan surat kabar *Harijan* (anak Allah), sebutan untuk *the Untouchables*. Melalui surat kabar ini, ia secara konsisten menyerukan *Satyagraha* (Guha 1986: 55).

Ketika Perang Dunia II meletus, Subhas Chandra Bose - seorang tokoh revolusioner - menyerukan agar India segera mengambil kesempatan untuk memproklamkan diri, namun Gandhi sendiri menyerukan *Congress* untuk mencari langkah-langkah kompromi dengan Inggris. Ia tidak ingin kemerdekaan India diraih dari Inggris yang hancur karena Perang Dunia II karena cara semacam ini bertentangan dengan ajaran tanpa kekerasan.

Menginjak tahun 1942, Perang Dunia II sudah menjalar ke Asia. Menanggapi situasi yang genting ini Gandhi menyerukan Inggris agar segera menarik diri dari India karena India tidak mau bermusuhan dengan negara lain. Ia menyatakan jika Jepang menyerbu India maka akan dihadapi dengan jalan tanpa kekerasan, selain itu kehadiran tentara asing akan mengganggu kemerdekaan India. Isi pernyataan tersebut menunjukkan suatu oposisi terhadap kepentingan Inggris yang dinyatakan dalam sikap non-kooperasi terhadap tentara asing (Inggris) dalam menghadapi Jepang.

Dalam perkembangan berikutnya, sikap Gandhi berubah dan secara mengejutkan pada tanggal 8 Agustus 1942, ia menyerukan *Quit India Movement* atau sering disebut Revolusi Agustus. Perubahan langkah ini dikritik oleh pengikutnya seperti Nehru dan Patel karena dalam aksi ini Gandhi tidak lagi berbicara tentang *satyagraha*, prinsip tanpa kekerasan atau sarana damai lainnya (Guha 1986: 86, 99). Sebagai akibat dari aksi ini, Gandhi beserta pimpinan *Congress* ditahan dan baru dibebaskan pada tahun 1944.

Penahanan Gandhi dan tokoh-tokoh *Congress* mengakibatkan tampilnya Subhas Chandra Bose sebagai pemimpin revolusi India. Ia membangun *Indian Nasional Army* atau *Azad Hind Fauj* dan menggerakkan seluruh kekuatan baik dari Hindu, Islam, tentara, polisi dan seluruh lapisan rakyat. Gandhi sama sekali tidak memberi komentar terkait dengan tindakan revolusioner ini.

Akhirnya, Revolusi India dan berakhirnya Perang Dunia II yang menghancurkan Inggris telah mendorong negara ini untuk membicarakan peralihan kekuasaan sekaligus partisi India - Pakistan. Pada bulan Maret 1946, *Cabinet Mission* yang dibentuk Inggris merekomendasikan pembentukan Negara Federal India. Selanjutnya pada tahun 1947 Perdana Menteri Clement Athlee secara resmi mengumumkan bahwa Inggris akan menyerahkan kekuasaan selambatnya pada bulan Juni 1948.

Penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1947, namun kemerdekaan ini diiringi dengan partisi India-Pakistan. Suatu hal yang disesali Gandhi, yang tidak hadir dalam upacara serah terima karena sedang berada di Calcutta untuk menenangkan massa yang menjadi korban partisi.

Partisi membawa konsekuensi luar biasa karena mendorong migrasi besar-besaran penduduk Muslim di wilayah India ke Pakistan dan penduduk Hindu di Pakistan ke India. Peristiwa itu diikuti pembunuhan terhadap penduduk Hindu maupun Muslim. Gandhi sendiri melakukan puasa untuk mencari titik

terang terhadap masalah ini (Guha 1986: 144). Saat tragis terjadi pada tanggal 30 Januari 1948, ketika hendak pergi dalam suatu upacara agama, Gandhi ditembak mati oleh seorang pemuda Sikh yang mencurigai langkahnya untuk mendamaikan massa yang bergolak.

ORIENTASI PEMIKIRAN GANDHI

Berbicara tentang pemikiran Gandhi terlihat jelas bahwa nilai-nilai spiritual merupakan prinsip utama yang nantinya mendasari gagasan sosial-politiknya, termasuk gagasannya tentang nasionalisme humanistik.

Nilai spiritual itu terungkap dari pengakuannya dalam otobiografi. Ia mengungkapkan bahwa karena ingin bertemu dengan Tuhan, ingin mencapai *moksa* maka ia hidup, bergerak dan menemukan dirinya dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu, kisah yang ditulis dalam otobiografi disebut sebagai pemaparan eksperimen Kebenaran dalam hidup (Gandhi 1985: 16–17). Dari eksperimen-eksperimen tersebut ia kemudian mengonsep beberapa kaidah tingkah laku yang sarat dengan nilai-nilai moral. Sebagai contoh, konsep sentral dalam pemikiran Gandhi yaitu *Ahimsa* merupakan prinsip yang ditemukan dalam ajaran agama namun oleh Gandhi digunakan sebagai dasar dalam konsep-konsep sosial politiknya.

Nilai-nilai spiritual itu awalnya ditangkap melalui pengalaman hidup sehari-hari. Melalui ayah, Gandhi melihat nilai kejujuran sedang dari tingkah laku ibu, ia belajar tentang kesalehan, kerendahan hati, kesabaran, pengorbanan, kebiasaan berdoa dan berpuasa. Baru setelah dewasa ia mempelajari Bhagavadgita. Dalam perjalanan hidup, pertumbuhan keyakinan terhadap ajaran agama ini ditandai dengan pemaknaan terhadap intisari Bhagavadgita – yang baru ia baca setelah kuliah di Inggris.

Bhagavadgita (disingkat Gita) mengajarkan tentang manusia ideal yakni manusia yang memiliki pekerti harmonis, mengabdikan pada kemamusiaan, mengupayakan emansipasi bagi jiwanya, memiliki pengetahuan tentang Atman dan berbakti pada Tuhan. Manusia yang melaksanakan ajaran tersebut akan mencapai tujuan tertinggi yaitu kelepasan atau *moksa*. Dalam situasi ini, manusia sudah terlepas dari siklus kelahiran dan kematian yang berarti berakhirnya segala kepahitan dan kedukaan hidup. Itulah yang disebut dengan nirwana, bersatu dengan yang Ilahi.

Untuk mencapai tujuan tertinggi yaitu Tuhan, Gita menekankan pengetahuan tentang Jiwa atau Tuhan. Jiwa (Brahman) atau Tuhan merupakan sumber nilai-nilai moral. Oleh sebab itu, Gita disebut juga Upanishad atau pengetahuan tentang Brahman.

Gita juga mengajar agar manusia memiliki pandangan dalam hidup, di mana nilai-nilai kehidupan seorang dilihat dari *svadharma* yang dilakukannya selama ia masih berada dalam hidup bermasyarakat. *Svadharma* merupakan tugas, kewajiban hidup untuk mencapai kebenaran, sekaligus yang membedakan seorang dengan orang lainnya. Dengan demikian perbedaan antar manusia tidak terletak pada kekayaan, kelahiran atau jabatan namun pada kebaktian terhadap Tuhan, nusa bangsa dan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas atau kewajiban hidup seringkali manusia menghadapi suatu kekuatan jahat (nafsu, amarah, loba) sedangkan untuk mencapai hidup yang kekal dan kedamaian yang langgeng, manusia harus menempuh jalan menuju pemusatan pikiran kesucian dan bertindak sepenuhnya kepada Tuhan. Tujuan ini memerlukan suatu kekuatan mulia seperti tidak gentar, kesucian hati, tanpa egoisme. Untuk itu, Gita mengajarkan *yoga* yang berarti jalan dan agama Hindu mengakui segala jalan yang hendak ditempuh untuk bersatu dengan Tuhan. Ada beberapa macam *yoga* di sini yaitu : jalan ilmu pengetahuan, jalan tindakan kerja, jalan kebaktian dan kasih sayang, dan jalan meditasi. Melalui pendisiplinan diri dalam jalan yang dipilih, manusia akan mencapai titik kulminasi yaitu menjadi manusia berjiwa kebenaran dan mencapai kedamaian kekal yang mengantarnya pada tujuan tertinggi yaitu bersatu dengan Tuhan.

Bagi seseorang yang mendalami makna Gita ini, maka dalam hidup ia akan memandang sama terhadap sesama makhluk, baik itu seorang Brahmana, orang hina tanpa kasta bahkan terhadap hewan pun. Dengan kata lain, manusia yang telah menghayati Gita akan memandang sama terhadap semua makhluk, mereka akan dijiwai oleh rasa persaudaraan di antara sesama manusia, rasa cinta terhadap semua makhluk karena menyadari bahwa Tuhan bersemayam dalam badan jasmani tiap makhluk (Pendit 1991: xxiv-xxxi).

Hubungan antara ajaran Gita dan gerak hidup Gandhi terlihat dalam pernyataan yang tertuang dalam otobiografinya. Ia mengungkapkan bahwa ia bicara, menulis, melakukan kegiatan sosial-politik adalah untuk mencapai tujuan tertinggi, *moksa* atau bersatu dengan Tuhan, yang sering kali disebutnya sebagai Kebenaran Absolut. Ia akan terus mencari-Nya, walaupun harus mengorbankan apapun yang dicintainya seperti dengan menjadi *Brahmachari* (Gandhi 1985: 16-17). Menjadi *Brahmachari*, dan kemudian mengabdikan sepenuhnya bagi bangsa dan masyarakat luas merupakan *svadharma*, jalan bakti yang ditempuh untuk menuju Yang Tertinggi.

Dari ungkapan-ungkapan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa nilai religius merupakan nilai moral bagi sikap dan tindakan Gandhi. Nilai-nilai tentang kebenaran, kewajiban, pengabdian, cinta dan humanitas merupakan nilai-nilai yang bersumber dari nilai-nilai religius yang nantinya berpengaruh dalam pembentukan gagasan sosial politiknya.

Pemikiran Gandhi selain dipengaruhi nilai religius-spiritual juga dipengaruhi nilai-nilai budaya yang bertumpu pada sistesisme. Dua dasar yaitu nilai spiritual dan sintesisme merupakan nilai-nilai yang mendasari peradaban India dan menghasilkan cara pandang seperti: hidup harmonis dengan agama dan budaya lain. Nilai spiritual yang berakar pada Hindu tidak bercorak eksklusif karena ia memberi ruang bagi kepercayaan terhadap nabi-nabi lain. Berkat nilai spiritual dan sistesisme, maka ideologi yang bercorak totaliter dan absolute, seperti komunisme dan fasisme tidak dapat berkembang di India (Guha 1986: 156-157). Nilai-nilai budaya ini besar pengaruhnya dalam pembentukan identitas nasional dalam pemikiran Gandhi, di mana ia meyakini bahwa nilai spiritual --yang merupakan prinsip dasar budaya

India-- merupakan nilai yang mampu mempersatukan bangsa.

Sebagai seorang pengacara, cara berfikir legalis juga mempengaruhi Gandhi. Hal ini terlihat dari penerapan mediasi, kompromi dan negosiasi sebagai sarana pendukung gerakan *satyagraha*. Ia mengungkapkan bahwa jiwa sejati seorang ahli hukum adalah menyatukan dua pihak yang terpisah. Selama 20 tahun melakukan praktik hukum, ia selalu mencari kompromi-kompromi itu.

Selanjutnya, pemikiran Ruskin dalam buku "*Unto this Last*" juga memiliki pengaruh dalam gagasan tatanan sosial-ekonomi Gandhi. Buku yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Gujarat, *Sarvodaya* (Kesejahteraan untuk Semua) dapat diringkas dalam tiga poin : pertama, kebaikan seseorang tercakup dalam kebaikan semua orang. Kedua, pekerjaan seorang ahli hukum sama nilainya dengan pekerjaan tukang cukur dalam arti keduanya berhak mendapatkan nafkah dari pekerjaannya tersebut dan ketiga, kehidupan yang menyangkut kerja dengan menggunakan jasmani seperti dalam kehidupan petani dan tukang adalah cara hidup yang luhur (Gandhi 1985: 279).

Ketiga poin tersebut merupakan sendi dasar bangunan masyarakat ideal dalam pemikiran Gandhi, di mana nilai keadilan tertuang dalam prinsip setiap orang harus bekerja dan mendapat upah yang sesuai. Penghargaan terhadap nilai kerja manusia dijunjung tinggi dengan penghargaan terhadap proses kerja manual dan bukan pada mekanisasi. Sepanjang hidupnya, Gandhi selalu berjuang untuk membangun sistem sosial ekonomi yang bertumpu pada tenaga manusia seperti dalam ekonomi *khadi* dan tidak pernah tergoda untuk beralih pada pemikiran ekonomi modern yang bertumpu pada industrialisasi. Salah satu alasan Gandhi adalah ekonomi yang ditunjang oleh industrialisasi akan melahirkan pengangguran di tengah masyarakat India yang kelebihan tenaga kerja.

Masyarakat ideal tersebut oleh Gandhi diwujudkan pertama kali di Afrika Selatan, yakni dalam dua komunitas yang dibangunnya, Phoenix Farm dan Tolstoy Farm, serta dua komunitas di India yaitu Ashram Sabharmati dan Wardha.

NASIONALISME HUMANISTIS MOHANDAS K. GANDHI

Nasionalisme humanistis, sebagaimana judul artikel ini diinspirasi dari ungkapan Gandhi tentang nasionalismenya sebagai berikut ini :

"My nationalism, fierce though it is, is not exclusive, or designed to harm any nation or individual. My mission is not merely brotherhood of Indian humanity. My mission is not freedom of India Through realization of freedom of India I hope to realize and carry on the mission of brotherhood of man. The conception of my patriotisme is nothing if it is not consistent with the broadest good of the humanity at large ... (Guha 1986: 25).

Ada satu hal menarik setelah membaca teks di atas dimana atribut humanitas dipilih untuk mendampingi gagasan nasionalisme, suatu gagasan yang dalam realitas memiliki kecenderungan untuk "memisahkan" bangsa lain dari bangsa sendiri. Nasionalisme menuntut adanya patriotisme

(kecintaan terhadap tanah air) yang pada akhirnya dapat menimbulkan pemujaan berlebihan terhadap bangsa sendiri dan meremehkan bangsa lain (chauvinisme). Dalam suatu kesempatan Gandhi pun mengungkapkan kecintaan terhadap tanah airnya sebagai berikut:

“India to me is the dearest country in the world, not because she is my country but because I have discovered the greatest good in it. Everyting in India attracts me. It has everyting that a human being with the highest possible aspiration can want. I cling to India like a child to its mother’s breast because I feel she gives me the spiritual nourishment that responds to my highest aspiration” (Guha 1986:150).

India dengan demikian merupakan sumber aspirasi dan kehidupan bagi Gandhi. Namun seperti yang telah dipaparkan dalam riwayat tokoh dan orientasi pemikiran, nasionalisme Gandhi tidak menunjukkan kecenderungan ke arah chauvinisme. Bahkan gagasan dalam sistem pemikiran sosial-politiknya diakui ada yang mendapat pengaruh dari dunia Barat.

Untuk memahami konsep nasionalisme humanistik Gandhi tersebut, maka terlebih dahulu dijelaskan pengaruh nilai religius yaitu cinta kasih atau sering disebut *Ahimsa*. Gandhi sangat menyakini pengaruh *Ahimsa* dalam gerak kehidupan dan nilai ini pula yang mendasari nasionalisme humanistiknya. Selanjutnya untuk memahami gagasan nasionalisme tersebut secara utuh, maka selain ditampilkan konsep *Ahimsa*, juga konsep-konsep lain yang mendukung yaitu : *Satyagraha*, *Nation*, *Hind Swaraj*, *Ram Raj*, *Gram Raj*, *Panchayat*, *Sarvodaya*, dan ekonomi *khadi*. Dengan memaparkan konsep-konsep tersebut kita diharapkan dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan nasionalisme humanistik Gandhi.

AHIMSA

“Hanya dia, yang tersentuh anak panah kasih mengetahui kekuatan itu”. Sepenggal *hymne* ini terasa begitu dalam maknanya bagi Gandhi kecil. Saat itu ia sudah pasrah bila ayahnya murka, mengetahui anaknya berbuat salah, namun ketika Gandhi berterus terang yang muncul dari sang ayah adalah rasa kasih sayang. Bagi Gandhi, *Ahimsa*, pertama dialami sebagai suatu kekuatan. Kekuatan yang mencakup semuanya, tiada batasnya dan apapun yang disentuhnya akan berubah (Gandhi 1985:43).

Pengalaman akan *Ahimsa* membawanya pada usaha permenungan tentang prinsip kehidupan dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa *Ahimsa* adalah suatu prinsip yang mendasari kesatuan seluruh kehidupan.

Kebalikan dari *Ahimsa* adalah *himsa* yaitu membunuh hidup. Di dunia ini, manusia tak berdaya di tengah lautan *himsa* karena ia tak bisa hidup tanpa melakukan *himsa* baik secara sadar maupun tidak. Suatu kenyataan bahwa manusia harus makan, minum dan bergerak mau tak mau sedikit banyak menyangkut *himsa*, yaitu membunuh hidup. Oleh sebab itu seorang penganut *Ahimsa* yang setia akan mendasari segala perbuatannya dengan rasa belas kasih dan sedapat mungkin menjauhkan diri dari pembunuhan makhluk yang terkecil sekalipun. Dengan demikian ia berusaha membebaskan diri

dari lingkaran maut *himsa*.

Ahimsa dan *himsa* merupakan dua simpul yang di satu sisi diwujudkan dalam rasa belas kasih, menyelamatkan kehidupan dan tidak membunuh. Sementara di sisi lain, kehidupan tak lepas sama sekali dari *himsa*. Sebagai gambaran yang paling jelas adalah dalam hidup bermasyarakat, di mana kesalahan seseorang akan mempengaruhi semua orang karena itu manusia tak mungkin bebas dari *himsa*. Di sini terlihat bahwa kelangsungan hidup masyarakat tergantung pada perpaduan antara *Ahimsa* dan *himsa* ini (Gandhi 1985:320).

Sebagai seorang yang meyakini *Ahimsa*, Gandhi juga sangat menyadari keberadaan *himsa*. Hal ini terlihat jelas bilamana dalam masyarakat bangsa terjadi perang, maka seseorang akan menghadapi dilema antara *Ahimsa* dan *himsa*. Untuk itu, Gandhi yang pernah berpartisipasi sebagai anggota korps ambulan dalam Perang Boer, Perang Zulu dan hampir terjun pada Perang Dunia I – menyatakan bila dua bangsa bersengketa maka kewajiban penganut *Ahimsa* adalah menghentikan sengketa. Orang yang tidak berdaya atau tak sanggup menjalankan kewajiban tersebut dapat mengambil bagian dalam perang melalui kekuatan jiwanya, berusaha membebaskan diri, bangsa maupun dunia dari perang.

Dalam tindakan politik, ia menyatakan suatu kewajaran untuk menentang sistem namun yang harus dihindari adalah tindakan menyerang manusia atau individu. Penyerangan terhadap orang merupakan penyerangan terhadap diri sendiri karena semua manusia adalah putra Pencipta yang sama. Jadi menghina satu orang berarti menghina Pencipta dan hal demikian bukan saja merugikan orang tersebut karena melalui dia merugikan seluruh dunia.

SATYAGRAHA

Ketika Gandhi sudah terjun dalam berbagai kegiatan politik di Afrika Selatan seperti dalam agitasi untuk menentang undang-undang yang diskriminatif, ia membutuhkan suatu istilah untuk mendefinisikan gerakan perjuangannya. Ia lantas menawarkan pada masyarakat melalui harian *Indian Opinion* untuk memberi nama itu. Hasilnya adalah *sadagraha* yang diciptakan oleh Maganlal Gandhi. *Sadagraha* berasal dari bahasa Gujarat yang artinya *sat* adalah kebenaran dan *agraha* adalah tekad. Oleh Gandhi kemudian diperjelas dengan *satyagraha* (Gandhi 1985: 295)

Sebagai suatu prinsip, *satyagraha* telah ada sebelum istilah itu diciptakan. *Satyagraha* seringkali diungkapkan kedalam bahasa Inggris yaitu *passive resistance* (perlawanan secara pasif), sehingga bagi orang Eropa, *satyagraha* serupa dengan senjata kaum lemah yang dicirikan rasa benci dan akhirnya berakhir dengan kekerasan. Gandhi menolak defenisi ini, baginya, *satyagraha* adalah ungkapan perjuangan rakyat India.

Bagi Gandhi, *satyagraha* merupakan gagasan tentang kekuatan yang bertumpu pada kekuatan jiwa (*soul force*) (Ramchandani 1994: 230). Dengan bertumpu pada kekuatan jiwa maka *satyagraha* pada hakekatnya adalah senjata bagi orang jujur dan berpegang pada kebenaran. Untuk itu, seorang *satyagrahi*

harus memahami *Ahimsa* terlebih dahulu. *satyagraha* tidak dapat ditawarkan secara massal kecuali rakyat telah mampu menangkap dan mentaati *Ahimsa* dalam batin, ucapan dan tingkah laku.

Di sini menjadi jelas bahwa sebagai atribut dari *Ahimsa*, *satyagraha* memiliki segi-segi batiniah seperti rasa damai, kesederhanaan, kesantunan dan hasrat berbuat baik terhadap lawan yang timbul dari hati, sehingga gerakan *satyagraha* tidak jatuh menjadi tindak kekerasan. Dengan demikian yang membedakan *satyagraha* dengan *passive resistance* adalah bahwa dalam *satyagraha* tidak ada ruang untuk membenci karena memegang prinsip tidak melukai lawan. Hal ini nantinya menjadi postulat *satyagraha* yaitu penaklukan lawan melalui penderitaan diri (Ali 1994: 29).

NASIONALISME DAN HIND SWARAJ (INDIAN HOME RULE)

Nasionalisme dapat didefinisikan sebagai suatu kesadaran, gagasan atau bahkan gerakan yang mengarahkan suatu bangsa menuju pembentukan organisasi politik yang ideal yakni negara-bangsa (Kohn 1956: 16).

Berbekal definisi tersebut maka usaha pemahaman terhadap nasionalisme Gandhi dilakukan dengan menjelaskan terlebih dahulu makna *swaraj* kemudian diikuti dengan pemaparan tentang tahap-tahap perkembangan pemikiran nasionalismenya.

Swaraj seperti yang diungkapkan dalam otobiografi, pada awalnya dimaksudkan sebagai kebebasan sosial yaitu kebebasan rakyat India dari kemiskinan (Gandhi 1985: 432). Namun dalam perkembangan berikutnya, *swaraj* memiliki makna yang lebih luas lagi yaitu kemerdekaan politik atau tepatnya kemerdekaan dari Inggris. Gagasan Gandhi tentang kemerdekaan nasional ini dapat dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, terjadi antara tahun 1904–1925. masa-masa ini dapat dikatakan sebagai tahap formasi, dimana ia belum membedakan konsep “pemerintahan sendiri” dengan “status dominion di bawah Inggris”. Menurutnya “status dominion” masih diartikan sebagai entitas berpemerintahan sendiri yang disatukan dengan kesetiaan terhadap Imperium Inggris. Jadi konsep kedaulatan belum disinggung di sini.

Kesadaran nasional Gandhi mulai berkembang menginjak tahun 1909, di mana ia mulai mempertanyakan hak-hak warga negara dalam status dominion, khususnya di Afrika Selatan. Perubahan pemikiran ini terjadi karena pada saat itu, Imperium tidak mampu menghentikan proses pembuatan undang-undang yang rasialis. Namun demikian, sampai dengan tahun 1914, Gandhi secara personal masih menunjukkan kesetiaan dan kewajibannya sebagai warga negara Imperium. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasinya dalam Perang Boer, Perang Zulu dan aspirasinya dalam Perang Dunia I.

Selanjutnya pada tahap kedua, tepatnya pada tahun 1925, Gandhi telah membedakan antara konsep “pemerintahan sendiri” dengan kekuasaan Imperium. Ia secara tegas mengemukakan konsep tentang ‘hak’ dan meragukan keberadaan Imperium yang dapat berdampingan dengan pemerintah India. Pada tahun 1929, ia mendukung penuh resolusi *Congress* tentang *purna swaraj* atau kedaulatan penuh bagi India.

Selaras dengan keyakinanya akan *Ahimsa* dan *satyagraha*, maka kedaulatan India itu haruslah diperjuangkan dengan cara tanpa kekerasan. *Ahimsa* haruslah menjadi prinsip di balik gerakan nasional (Young India, 27 September 1924).

Dalam perjuangan menentang Inggris, Gandhi sangat yakin bahwa metode-metode yang diterapkan dalam *satyagraha* seperti: boikot terhadap barang-barang Inggris, non kooperasi terhadap pemerintah dan pembangkangan sipil (pelanggaran undang-undang pemerintah termasuk tidak membayar pajak) akan menekan Inggris untuk segera menyerahkan kekuasaan pada India. Ia yakin bahwa penderitaan orang-orang tidak bersalah akan menggerakkan hati Inggris sekaligus menekan mereka untuk mau berunding secara damai hingga akhirnya bersedia melimpahkan kekuasaan pada India.

Di sinilah letak *satyagraha* sebagai suatu etika politik Gandhi di mana ia tidak hanya menekankan kemerdekaan sebagai "tujuan" tetapi juga "sarana" untuk melawan, *satyagraha* yang berisi prinsip tanpa kekerasan (*non-violence*) mengajarkan strategi perjuangan tanpa perebutan kekuasaan secara langsung karena hal ini dapat memicu kekerasan. Adapun strategi perjuangan yang sesuai dengan jiwa *satyagraha* adalah peralihan kekuasaan secara damai melalui negosiasi dan *gentlement agreement* (Guha 1986 : 39).

NATION (BANGSA)

Dalam sejarah, banyak nama yang digunakan untuk menyebut orang India. Pada awalnya mereka dikenal dengan *Bharatiya*, kemudian juga disebut *Sindhu*, *Hindu* dan *Indos* oleh orang-orang asing. Bangsa Muslim yang masuk ke negeri ini menyebutnya Hindustani dan akhirnya, orang Eropa menyebut India.

Bangsa India sebagai satu kesatuan dibentuk oleh budaya dan bukan melalui proses politik. Budaya India adalah budaya yang dihasilkan oleh para guru spiritual, sastrawan, ataupun orang-orang suci yang menuliskan karya-karya mereka dalam kitab suci dan diucap dalam doa-doa yang memuji kebesaran tanah India. Bangsa India melihat tanah airnya sebagai tanah suci, di mana di seluruh pejuuru tersebar tempat-tempat berziarah. Ketika pendatang beragama Islam masuk terjadilah sintesis yang memperkaya budaya India.

Budaya India yang merupakan sistesis dari budaya Hindu, Islam dan budaya-budaya lainnya, dengan demikian memberi kontribusi bagi peradaban India. Gandhi sendiri menyakini bahwa budaya merupakan prinsip nasionalitas India dan merupakan unsur pembentuk identitas bersama. Dengan konsep ini Gandhi tidak mengidentifikasikan bangsa India dengan agama Hindu. Ia menyadari bahwa India didiami oleh berbagai bangsa, ras dan agama, namun dari keragaman tersebut telah melahirkan suatu ke "Indian" yaitu perasaan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa India yang memiliki akar budaya yang sama. Dengan gagasan ini pula ia menentang gagasan Moh. Ali Jinnah yang mengklaim bahwa India terdiri dari dua bangsa yaitu bangsa Hindu dan Muslim.

Lebih lanjut, Gandhi menyatakan bahwa dalam realitas terdapat banyak agama sebagaimana individu, tetapi harus pula disadari bahwa spirit nasionalitas tidak bisa mencampuri agama seseorang. Di dunia ini tidak ada nasionalitas yang sinonim dengan satu agama, demikian pula di India. Dengan demikian kesetiaan harus diserahkan kepada tanah India. Hindustan adalah milik orang yang lahir di tanah India baik itu orang Parsi, Kristen, Muslim atau Hindu. Dalam negara India yang merdeka, tidak ada pemerintah Hindu yang ada adalah pemerintah India. (Guha 1986: 165-166)

SARVODAYA (KESEJAHTERAAN UNTUK SEMUA)

Sarvodaya merupakan gagasan Gandhi tentang tatanan sosial-ekonomi yang ideal. Sebagai suatu gagasan yang menyangkut reformasi sosial, *sarvodaya* meliputi pemanfaatan *charka* (alat pemintal benang yang digerakan tangan), ekonomi *khadi*, revitalisasi industri pedesaan, penghormatan terhadap martabat orang-orang yang terpinggirkan (*the untouchables*), pengentasan kemiskinan, persatuan komunal, penggunaan bahasa Hindustan-Urdu sebagai bahasa lingua franca serta inovasi pendidikan dasar.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, *sarvodaya* merupakan gagasan yang diadopsi Gandhi dari buku "*Unto This Last*" karya Ruskin. Namun di tangan Gandhi, gagasan tentang kesetaraan dan kesejahteraan tersebut ditujukan untuk memerangi kemiskinan rakyat India. Seperti diungkapkan Gandhi, misi *sarvodaya* adalah mengabdikan pada *Daridra Narayan*. *Daridra Narayan* adalah satu dari sejuta nama di mana umat manusia mengenalnya sebagai Tuhan, dan itu berarti Tuhan bagi orang miskin. Tuhan hadir di hati orang miskin, di hati jutaan orang-orang terpinggirkan (*harijan, the Untouchables*). Jadi di sini terdapat hubungan erat antara *sarvodaya* dan *swaraj* dalam arti kebebasan sosial bagi orang-orang miskin .

Gagasan *sarvodaya*, selain ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan sosial, juga ditujukan untuk melakukan reformasi sosial khususnya sistem kasta. Gandhi sangat peduli terhadap posisi kelompok *harijan* dalam masyarakat yang berkasta sehingga melalui reformasi ekonomi, mereka diharapkan memiliki tempat dan kekuatan dalam India yang merdeka (*Young India*, 14 Januari 1924).

EKONOMI KHADI

Beranjak dari tatanan sosial yang ideal seperti dalam gagasan *sarvodaya*, berikutnya, Gandhi merumuskan sistem ekonomi yang ideal sebagai basis pendukung *sarvodaya* yaitu sistem ekonomi *khadi*. *Khadi* merupakan sejenis kain yang ditenun dengan alat tenun bukan mesin (ATBM) untuk pakaian khas India, namun bagi Gandhi jenis kain ini berserta pemintal benang (*charka*) merupakan sarana untuk memerangi kelaparan dan membantu jutaan petani (*Young India*, 8 May 1924). Lebih luas lagi, *charka* diartikan sebagai sarana untuk *swaraj*, di mana dalam India yang merdeka nantinya diharapkan tidak ada lagi kelompok yang terpinggirkan (Speech at Spinning Demonstration, Calcutta, 6 November 1924 dan Navajivan, 23 September 1924).

Khadi juga merupakan simbol kedekatan Gandhi dengan rakyat di desa-desa karena Gandhi dan pengikut-pengikutnya dengan tekun mengajar rakyat untuk memintal benang hingga mahir menenun bahan sandang mereka sendiri. Untuk itu Gandhi menghidupkan *charkha* sebagai alat pemintal yang bisa digunakan rakyat di desa-desa, dengan demikian ia telah menghidupkan industri di pedesaan dan memberi sarana hidup bagi jutaan penganggur.

Pemberdayaan tenaga rakyat di pedesaan tersebut telah mengisyaratkan adanya mentalitas yang hendak dibangun Gandhi yakni kebebasan dari eksploitasi sistem industri yang merupakan sumber kekerasan terhadap masyarakat di desa-desa. Oleh sebab itu tak mengherankan bila Gandhi secara tegas menolak sistem produksi pabrik di India dan impor kain dari Inggris karena keduanya diyakini sebagai penyebab pengangguran dan kemiskinan rakyat.

Sebagai suatu sistem, ekonomi *khadi* menciptakan sistem produksi dan distribusi yang terdesentralisasi di mana desa merupakan basis kegiatan ekonomi tersebut. Beranjak dari sistem ekonomi yang terdesentralisasi, Gandhi nantinya mengembangkan pemikiran tentang sistem sosial politik, *gram swaraj* atau *gram panchayat*, yang merupakan unit dasar superstruktur masyarakat India. Ia memvisualisasikan unit-unit *panchayat* sebagai unit yang bercorak *autharkis* (mandiri) di mana industri pedesaan merupakan penyangga ketahanan masyarakat desa.

RAMRAJYA DAN GRAM SWARAJ (PANCHAYAT RAJ)

Ramrajya (negara yang demokratis) dan *gram swaraj* atau *panchayat raj* (pemerintahan lokal berbasis desa) merupakan dua gagasan Gandhi tentang negara dan kedaulatan rakyat yang dicirikan oleh adanya desentralisasi kekuasaan.

Dalam penjelasannya, Gandhi mengungkapkan bahwa negara demokrasi pada hakekatnya merupakan negara yang berdasar pada kebebasan individu yang disiplin atau dengan kata lain, *ramrajya* adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang berbasis pada otoritas moral murni dari tiap-tiap individu. Dengan demikian, negara yang demokratis wajib memberi ruang bagi semua bentuk aliran atau pemikiran individu. Dalam tatanan realitas, prinsip demokrasi ini hanya dapat terlaksana dalam sistem kenegaraan yang tidak terlalu tersentralisasi, sehingga warga negara dan masyarakat tidak menjadi otomaton atau budak. Suatu demokrasi sejati, menurut Gandhi tidaklah bekerja dengan mengandalkan dua puluh orang yang duduk di pusat melainkan berproses dari bawah yakni oleh rakyat di tiap desa yang kemudian membentuk *panchayat*.

Sebagai suatu lembaga, *panchayat* dipegang oleh lima orang yang memiliki otoritas dan yurisdiksi. Kelima orang tersebut dipilih setiap tahun oleh penduduk (baik laki-laki atau perempuan) yang sudah dewasa. Lembaga *panchayat* memiliki tiga fungsi yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan lembaga *panchayat* yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat maka desa diharapkan menjadi desa *swaraj*, suatu desa yang mencerminkan

republikanisme yang sempurna dan bercorak *autharkis* yakni mandiri dalam bidang ekonomi.

Desa *swaraj* merupakan desa yang mampu mencukupi kebutuhan pangan dan kapas untuk sandang. Desa juga harus memiliki fasilitas berikut: pemeliharaan ternak, tempat rekreasi anak dan orang dewasa, teater, sekolah dan aula umum, sarana pendidikan, dan bila masih ada tanah yang tersisa maka dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman yang bisa dijual. Sementara itu, sebagai dasar interaksi sosial, desa *swaraj* harus menerapkan prinsip non-diskriminasi dan prinsip tanpa kekerasan.

Secara ringkas, tatanan sistem politik Gandhi dapat disimpulkan sebagai tatanan yang menempatkan kebebasan individu sebagai titik sentral yang mewujudkan dalam desentralisasi kekuasaan. Dengan sistem kekuasaan yang menjamin kebebasan maka seseorang akan dengan rela menyerahkan diri untuk mengabdikan masyarakat. Sebaliknya, bila kebebasan dicabut, individu menjadi otomaton dan masyarakat akan hancur. Desentralisasi kekuasaan itu, tidak hanya terwujud dalam tatanan politik namun juga dalam tatanan ekonomi sehingga dapat dikatakan bahwa desentralisasi adalah *sine qua non* bagi penghormatan martabat manusia (Guha 1986: 206-214).

Sarvodaya, ekonomi *khadi*, *ramrajya*, *panchayat raj* merupakan gagasan-gagasan tentang tatanan sosial, politik dan ekonomi yang ideal, di mana di balik gagasan tersebut terdapat prinsip keadilan sosial, kemerdekaan, kedaulatan rakyat, kesetaraan sosial serta prinsip tanpa kekerasan. Dengan dukungan gagasan-gagasan tersebut maka secara umum nasionalisme Gandhi dapat dipahami sebagai suatu kesadaran sekaligus gerakan untuk memperjuangkan kesatuan bangsa, kedaulatan negara sekaligus suatu gerakan reformasi sosial menuju negara-bangsa dan tatanan sosial yang ideal.

PENUTUP

Dari uraian dalam artikel ini, kita melihat bahwa Gandhi adalah seorang nasionalis sekaligus humanis. Nasionalisme humanistisnya merupakan sistem pemikiran yang menjunjung kemerdekaan India sekaligus membawa misi persaudaraan dan memajukan peradaban dunia. Setidaknya terdapat dua hal yang patut ditampilkan dari nasionalisme humanistis Gandhi, pertama, menyangkut prinsip tanpa kekerasan. Prinsip ini menempatkan manusia sebagai tujuan dan bukan sarana dalam proses pergerakan kemerdekaan bangsa dan kedua, menyangkut perjuangan kemanusiaan untuk mengangkat kaum *harijan* atau mereka "yang terpinggirkan".

Dengan prinsip tanpa kekerasan, perjuangan kemerdekaan di bawah kendali Gandhi merupakan perjuangan dengan kekuatan spiritual dalam wujud gerakan *satyagraha*. Prinsip tanpa kekerasan melandasi terbentuknya model oposisi yang tidak bersifat menyerang, melukai, atau bahkan membenci lawan sehingga gerakan oposisi yang disuarakan Gandhi jauh dari hingar bingar gerakan revolusioner. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gerakan *satyagraha* sulit untuk jatuh ke pertentangan fisik yang dapat menimbulkan korban jiwa. Kekuatan gerakan *satyagraha* terletak pada

penghayatan rakyat terhadap *Ahimsa* dan ini tentunya menyulitkan karena hakekat perlawanan adalah mengalahkan lawan dengan penderitaan diri, oleh sebab itu tak mengherankan bila dalam artikel kita melihat bahwa tidak selamanya gerakan *satyagraha* berhasil. Namun kenyataan ini sendiri ternyata tidak menyurutkan langkah Gandhi untuk tetap menyuarakan perjuangan tanpa kekerasan.

Dari pemikiran dan perjuangan Gandhi kita juga dapat melihat bahwa prinsip tanpa kekerasan merupakan nilai moral yang menjadi dasar tindakan politiknya. Bila kita kaji lebih jauh, prinsip tanpa kekerasan berasal dari ajaran *Ahimsa*, suatu nilai moral yang memiliki akar dalam ajaran agama yang diyakini Gandhi. Namun, walaupun Gandhi mengadopsi nilai-nilai religius sebagai basis tindakan politik, ia secara hati-hati tidak menempatkannya sebagai basis persatuan bangsa. Di sini menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang sekuler. Di satu sisi, Tuhan atau Kebenaran diakui sebagai satu-satunya pembenar eksistensi manusia. Manusia secara personal berelasi dengan Kebenaran melalui *svadharma* serta berani mempertanggungjawabkan tingkah lakunya. Di sisi lain, di tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara, Gandhi tidak menempatkan ajaran agamanya sebagai sumber aturan hidup berbangsa dan bernegara karena menurut Gandhi, bangsa India disatukan oleh budaya yang sama dan tidak berdasarkan pada agama tertentu.

Aspek humanistis dalam nasionalisme Gandhi tidak hanya menonjol dalam prinsip tanpa kekerasan, melainkan juga dalam gagasan kesetaraan dan keadilan sosial yang tercakup dalam *sarvodaya*. *Sarvodaya* adalah suatu tatanan sosial ideal di mana nilai-nilai kemanusiaan diperjuangkan untuk mencapai kebebasan sosial-politik bagi jutaan orang miskin dan terpinggirkan. Seiring dengan *sarvodaya* lahirlah gagasan *swaraj*, ekonomi *khadi* dan *panchayat raj*. Secara umum, gagasan tersebut lahir untuk mengangkat bangsa India dari dominasi bangsa Inggris dan secara khusus untuk membebaskan kaum *harijan* dari ketertindasan dalam sistem kasta serta dari eksploitasi sistem ekonomi yang menerapkan mekanisasi. Inilah *swaraj* atau kemerdekaan sejati bagi bangsa India.

Setelah membaca gagasan Gandhi secara komprehensif maka kita melihat bahwa ketokohan Gandhi lahir dari situasi yang melingkupinya. Ia mengalami hidup sebagai anggota bangsa yang terjajah sekaligus sebagai anggota masyarakat yang hidup di tengah lautan kemiskinan. Kedua situasi tersebut belum lenyap pada abad ke-21 ini. Kita masih menyaksikan negara-negara berkembang yang berjuang agar bebas dari tekanan negara-negara maju, selain berjuang untuk menanggulangi kemiskinan di dalam negeri. Situasi ini tentunya sangat kondusif bagi terjadinya konflik internasional maupun nasional.

Untuk menyelesaikan konflik tersebut, maka ajaran Gandhi tentang prinsip tanpa kekerasan cukup relevan untuk diterapkan, mengingat para aktor politik sering mengadopsi tindakan kekerasan sebagai mode solusi konflik. Hal lain yang dapat diteladani adalah gagasan pembentukan tatanan sosial yang ideal (*sarvodaya*). Di mana dalam tatanan tersebut, nilai-nilai

kemandirian, keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan diwujudkan baik dalam institusi ekonomi maupun politik. Di sini Gandhi telah menyadari bahwa ketidakadilan merupakan salah satu akar tindak kekerasan, sesuatu yang ditolaknya. Dengan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam institusi ekonomi maupun politik diharapkan tiap orang dapat menikmati kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan serta hidup dalam tatanan yang dijiwai oleh nilai-nilai spiritual seperti prinsip tanpa kekerasan.

Selanjutnya ada satu hal lagi yang dapat ditarik dari kehidupan Gandhi dan dapat diacu dalam hidup masa kini yaitu integritas moral dan sikapnya sebagai seorang nasionalis. Ia menghayati nilai-nilai religius tanpa terperangkap dalam eksklusivisme agama. Bahkan nilai-nilai tersebut dikembangkan untuk semakin mencintai sesama umat manusia, sehingga dalam pemikiran Gandhi tidak memberi ruang terhadap paham diskriminasi, sebaliknya, nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan martabat manusia dijunjung tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melalui prinsip tanpa kekerasan, antidiskriminasi serta solidaritas terhadap kaum *harijan* atau kaum yang terpinggirkan, Gandhi telah memberi sumbangan besar bagi gerakan perjuangan India sekaligus perjuangan kemanusiaan umumnya.

DAFTAR ACUAN

- Ali, Shanti Sadig. 1994. "The Relevance of Gandhi Today", dalam *Gandhi & South Africa*. Delhi: Hind Pocket Books Pvt. Ltd.
- Gandhi, M.K. "New Year". 1963. Indian Oponion, 2 January 1909 dalam *The Collected Works of Mahatma Gandhi Vol. IX*. September 1908-1909. The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India. Ahmedabad: Navajivan Trust.
- _____. 1967. "A Heart Searcher". Young India, 8 May 1924 dalam *The Collected Works of Mahatma Gandhi Vol. XXIV*. May - Augst 1924. The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India. Ahmedabad: Navajivan Trust.
- _____. 1967. "The Truth About Nationalism". Young India, 27 September 1924 dalam *The Collected Works of Mahatma Gandhi Vol. XXV*. August 1924-January 1925. The Publications Division. Ministry of Information and broadcasting Government of India. Ahmedabad: Navajivan Trust.
- _____. 1967. "Speech at Spinning Demonstration". Cacutta, 6 November 1924 dalam *The Collected Works of Mahatma Gandhi Vol. XXV*. August 1924-January 1925. The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India. Ahmedabad: Navajivan Trust.
- _____. 1967. "Citizen's Honour is Contry's Honour". Navajivan, 23 November 1924 dalam *The Collected Works of Mahatma Gandhi Vol. XXV*. August 24-January 1925. The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India. Ahmedabad: Navajivan Trust.
- _____. 1968. "The Crime of Caste". Young India, 14 Janusri 1926 dalam *The Collected Works of Mahatma Gandhi Vol. XXIX*. 1925-1926. The Publications Division. Ministry of Information and Broadcasting Government of India. Ahmedabad: Navajivan Trust.
- Gandhi. 1985. *Gandhi: Sebuah Otobiografi*. Terjemahan Gd. Bagoes Oka, Jakarta : Penerbit Sinar Harapan.
- Gandhi, Rajmohan. 1994. "The Origin and Growth of Satyagraha - Gandhi's Reaction to the Conditions of Indians in South Africa". dalam *Gandhi & South Africa*. Delhi: Hind Pocket Books. PVT. Ltd.
- Guha, Samar. 1986. *The Mahatma and The Netaji, Two Men of Destiny of India*. New Delhi: Sterling Publisher Private Ltd.

- Krisnaswamy, N. 1994. "The Repercussions of the South Africa Satyagraha Movement in India". dalam *Gandhi & South Affrica*. Delhi: Hind Pokcet Books. Pvt. Ltd.
- Kohn, Hans. 1956. *The Idea of Nationalism*. New York. The Mac Millan Company.
- Pendit, Nyoman S. 1991. (Penerj. dan Pendahuluan), *Bhagavadgita*. Tanpa Kota: Yayasan Dharma Sarathi.
- Power, Paul F. 1961. *Gandhi on World Affairs*. Bombay : The Perennial Press.
- Ramchandani, R.R. 1994. "Gandhi in South Africa, A Study in Social Accounting". dalam *Gandhi & South Affrica*. Delhi: Hind Pokcet Books. Pvt. Ltd.
- Singh, Daleep. 1994. "The Socio-economic Condition in South Africa 1652-1893". dalam *Gandhi & South Affrica*. Delhi: Hind Pokcet Books. Pvt Ltd.